

**PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA PT BANK NEGARA
INDONESIA (PERSERO) TBK JAKARTA**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian
Program Pendidikan Diploma 3
Program Studi Keuangan dan Perbankan



Oleh :

HANA PUTRI KUSUMA WARDANI

NIM : 2015110016

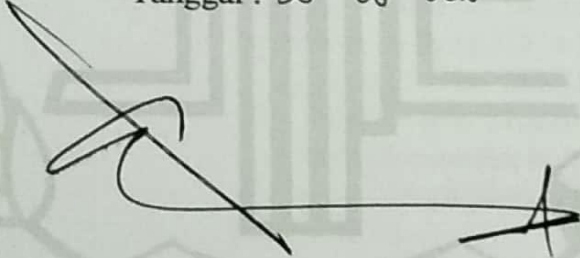
**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2018**

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Hana Putri Kusuma Wardani
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 9 April 1997
N.I.M : 2015110016
Program Studi : Perbankan dan Keuangan
Program Pendidikan : Diploma 3
Judul : Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Jakarta

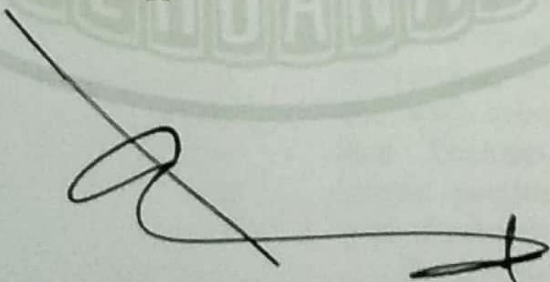
Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing :
Tanggal : 30 - 08 - 2018



(Drs. Ec. Mochammad Farid, M.M.)

Ketua Program Studi Diploma Perbankan dan Keuangan
Tanggal : 30 - 08 - 2018



(Drs. Ec. Mochammad Farid, M.M.)

IMPLEMENTATION OF SMALL BUSINESS LOAN IN PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK JAKARTA

Hana Putri Kusuma Wardani

STIE Perbanas Surabaya

E-mail : 2015110016@students.perbanas.ac.id

Mochammad Farid

STIE Perbanas Surabaya

E-mail : farid@perbanas.ac.id

Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya

ABSTRACT

BNI Jakarta has important roles in the survival of the economy of Indonesia, one of the roles is to give credit to Micro Small and Medium Enterprises which is called Small Business Loan (KUR). This observation aims to determine how the implementation of the called Small Business Loan (KUR) in the PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Jakarta. This final assignment uses the research methods of interview and document study. From the results of observations conducted may be aware that BNI's KUR is given to the Micro Small and Medium Enterprises productive and worthy. The requirements have been fulfilled by the debtor then the implementation procedure of KUR such as: Submission of KUR applications, the analysis of KUR feasibility, and the realization of the KUR which the debtor and the bank perform the binding credit and the credit agreement. The conclusion of the Small Business Loan (KUR) implementation of Jakarta has been in accordance with applicable regulations but it will be better to improve the quality of human resources, perform additional of human resources and build up the BNI network outlet for the allocation of KUR which is expected in the implementation can reach all the debtors of KUR.

Keyword : Implementation, Small Business Loan

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang perbankan yang dimaksud dengan bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kemasyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Perkreditan merupakan kegiatan yang penting bagi perbankan karena kredit juga merupakan salah satu sumber dana yang penting untuk setiap jenis usaha. Besarnya

jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Kredit selain mempunyai fungsi dalam membantu masyarakat, juga merupakan jantung dan urat nadi sebuah bank, tulang punggung bagi kehidupan usaha bank tersebut, karena pendapatan terbesar dari sebuah bank diperoleh dari jasa kredit itu sendiri.

Pengembangan Kredit Usaha Rakyat merupakan salah satu topik yang menarik untuk dibahas, disempurnakan, ditingkatkan agar penanganannya lebih efektif untuk pengoptimalan perbankan

bagi pengembangan dan peningkatan kredit tersebut. Mengingat kredit yang diberikan bank kepada usaha rakyat merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam membantu program pemerintah yang kurang maksimal. Hal ini terbukti masih banyaknya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang belum mendapat perhatian sepenuhnya dari pemerintah. Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Inpres Nomor 6 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM yang diikuti dengan nota kesepahaman bersama antara Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM. Akhirnya pada tanggal 5 November 2007, Presiden R.I Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan kredit bagi UMKM dengan pola penjaminan dengan nama Kredit Usaha Rakyat dan di dukung oleh Inpres Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009 untuk menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan kredit usaha rakyat ini. Bank Negara Indonesia (BNI) Jakarta merupakan suatu lembaga keuangan yang diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan dana dari masyarakat yang disalurkan untuk kepentingan masyarakat.

Kredit Usaha Rakyat adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM) dibidang usaha produktif dan layak namun belum *bankable* dan dijamin oleh perusahaan penjamin. Dalam pemberian kredit (penyaluran kredit) kepada penerima kredit (debitur) atau dalam hal ini adalah nasabah, Bank Negara Indonesia (BNI) Jakarta selaku kreditur harus benar-benar menganalisa debitur baik secara *intern* maupun secara *ekstern* agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Dengan proses yang sangat mudah, untuk memudahkan pelaksanaan analisa permintaan kredit

yang diajukan serta menimalisir resiko kredit, didalam kebijaksanaan umum perlu dimasukkan standar mutu kredit. Jumlah permintaan kredit yang diterima bank seringkali tidak sedikit. Oleh karena itu untuk menghemat waktu, petugas bank memberikan syarat-syarat yang dapat dipenuhi debitur agar permintaan kreditnya dapat dipertimbangkan.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Kasmir (2014:14) dalam bukunya Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya.

Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, bank juga memberikan jasa bank lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman, industri perbankan mengalami perubahan besar karena deregulasi peraturan. Sehingga mengakibatkan bank lebih kompetitif dalam menyediakan jasa bank lainnya. Jasa tersebut di antaranya termasuk transfer dana antar rekening, pembayaran tagihan, sarana investasi, penukaran mata uang asing dan banyak lagi.

Definisi Kredit

Menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 tentang kredit adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Hasibuan (2001:87) menyatakan bahwa Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali

bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Unsur-unsur Kredit

Unsur-unsur kredit menurut Kasmir (2012:114) adalah:

1. **Kepercayaan**
Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang akan diberikan tersebut benar-benar akan diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit.
2. **Kesepakatan**
Disamping unsur percaya, didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
3. **Jangka waktu**
Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (di bawah 1 tahun), jangka waktu menengah (1 sampai 3 tahun) atau jangka panjang (di atas 3 tahun).
4. **Risiko**
Adanya suatu tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit maka semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya.
5. **Balas Jasa**
Balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebaskan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

Tujuan dan Fungsi Kredit

Rivai (2006:6) pada bukunya menjelaskan bahwa pada dasarnya terdapat

dua fungsi yang saling berkaitan dengan kredit, yaitu *profitability* dan *safety*. *Profitability* yaitu, tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan dari bunga yang harus dibayar nasabah. Sedangkan *safety* merupakan keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat tercapai tanpa hambatan yang berarti.

Tjoekam (1999:3) menjelaskan bahwa dalam perkreditan melibatkan beberapa pihak yaitu: kreditur (bank), debitur (penerima kredit), otorita moneter (pemerintah) dan masyarakat pada umumnya.

Sedangkan Abdullah (2005:84) melihat bahwa Tujuan pemberian kredit dari pendekatan mikro ekonomi guna mendapatkan suatu nilai tambah bagi nasabah maupun bank sebagai kreditur, dan dari pendekatan makro ekonomi melihat pemberian kredit merupakan salah satu instrumen untuk menjaga keseimbangan jumlah uang beredar di masyarakat.

Hasibuan (2001:88), meninjau fungsi kredit antara lain sebagai berikut:

1. Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian
2. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat.
3. Memperlancar arus barang dan jasa.
4. Meningkatkan hubungan internasional.
5. Meningkatkan daya guna (*utility*) barang.
6. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat.
7. Memperbesar modal perusahaan.
8. Meningkatkan produktivitas dana yang ada.
9. Meningkatkan income per kapita masyarakat.

Jenis Kredit

Menurut Kasmir (2012:85) jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain:

1. Jenis kredit dilihat dari segi kegunaan yaitu:
 - a. Kredit investasi
Yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru dimana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relative lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.
 - b. Kredit modal kerja
Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contoh, kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Kredit modal kerja merupakan kredit yang dicairkan untuk mendukung kredit investasi yang sudah ada.
2. Jenis kredit dilihat dari segi tujuan kredit
Kredit jenis ini dilihat dari tujuan pemakaian suatu kredit, apakah bertujuan untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan pribadi. Jenis kredit dilihat dari segi tujuan adalah sebagai berikut:
 - a. Kredit produktif
Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan sesuatu baik berupa barang maupun jasa.
 - b. Kredit konsumtif
Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi.
 - c. Kredit perdagangan
Kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu.
3. Jenis Kredit dilihat dari segi jangka waktu
Dilihat dari segi jangka waktu, artinya lamanya masa pemberian kredit mulai dari pertama kali diberikan sampai masa pelunasannya. Jenis kredit ini adalah sebagai berikut:
 - a. Kredit jangka pendek
Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
 - b. Kredit jangka menengah
Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja. Beberapa bank mengklasifikasikan kredit menengah menjadi kredit jangka panjang.
 - c. Kredit jangka panjang
Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang, yaitu di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur dan untuk juga kredit konsumtif seperti kredit perumahan.
4. Jenis Kredit dilihat dari segi jaminan
Dilihat dari segi jaminan maksudnya adalah setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat berharga minimal senilai kredit yang diberikan. Jenis kredit dilihat dari segi jaminan adalah sebagai berikut:
 - a. Kredit dengan jaminan
Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya, setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.
 - b. Kredit tanpa jaminan

Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

5. Jenis Kredit dilihat dari segi sektor usaha

Setiap sektor usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pemberian fasilitas kredit pun berbeda pula. Jenis kredit jika dilihat dari sektor usaha sebagai berikut:

- a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
- b. Kredit peternakan, dalam hal ini kredit diberikan untuk jangka waktu yang relatif pendek misalnya peternakan ayam dan untuk kredit jangka panjang seperti kambing atau sapi.
- c. Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri pengolahan baik untuk industri kecil, menengah atau besar.
- d. Kredit pertambangan, yaitu jenis kredit untuk usaha tambang yang dibiayainya, biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak, atau tambang timah.
- e. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar.
- f. Kredit profesi, diberikan kepada kalangan para profesional seperti, dosen, dokter, atau pengacara.
- g. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.
- h. Dan sektor-sektor usaha lainnya.

Jaminan Kredit

Menurut Kasmir (2012:123), untuk melindungi uang yang dikucurkan lewat kredit dari risiko kerugian, maka pihak perbankan membuat pagar pengamanan. Dalam kondisi sebaik apapun atau dengan analisis sebaik mungkin, risiko kredit macet tidak dapat dihindari. Pagar pengamanan yang dibuat biasanya berupa jaminan yang harus diberikan debitur. Tujuan jaminan adalah untuk melindungi kredit dari risiko kerugian, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Lebih dari itu jaminan yang diserahkan oleh nasabah merupakan beban, sehingga si nasabah akan sungguh-sungguh untuk mengembalikan kredit yang diambilnya.

Prinsip Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2012:136), Dalam pemberian kredit terdapat prinsip dalam pemberian kredit untuk melakukan penilaian atas permohonan kredit oleh debitur dengan menggunakan analisis 5C dan 7P.

Penilaian dengan analisis 5C adalah sebagai berikut:

1. *Character* (watak/kepribadian)
Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi.
2. *Capacity* (kemampuan)
Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya.
3. *Capital* (modal)
Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat

dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitasnya, tentabilitas dan ukuran lainnya..

4. *Condition Of economy* (kondisi perekonomian)

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, social, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang.

5. *Collateral* (Jaminan atau agunan)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.

Selanjutnya, penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan analisis 7P kredit dengan unsur penilaian sebagai berikut:

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

3. *Perpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikururkan oleh bank, tetapi melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Prosedur Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2012:143), Secara umum diijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut:

1. Pengajuan berkas-berkas.
2. Penyelidikan berkas pinjaman
3. Wawancara I
4. *On the Spot*
5. Wawancara ke II
6. Keputusan Kredit
7. Penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya
8. Realisasi Kredit
9. Penyaluran/penarikan dana

Kualitas Kredit

Adapun kualitas kredit digolongkan menjadi beberapa golongan dalam buku Kasmir (2012:117) dijelaskan yaitu sebagai berikut:

1. Lancar (*pass*)

Kriteria atau ukuran suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila:

- a. Pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu
- b. Memiliki mutasi rekening yang aktif
- c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).

2. Dalam perhatian khusus (*special mention*)

Artinya suatu kredit dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang belum melampaui 90 hari
- b. Kadang-kadang terjadi cerukan
- c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
- d. Mutasi rekening relatif aktif

- e. Didukung dengan pinjaman baru.
3. Kurang lancar (*substandard*)
Suatu kredit dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria antara lain:
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 90 hari
 - b. Sering terjadi cerukan
 - c. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
 - d. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
 - e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
 - f. Dokumen pinjaman yang lemah.
4. Diragukan (*doubtful*)
Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria berikut antara lain:
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 180 hari
 - b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen
 - c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
 - d. Terjadi kapitalisasi bunga
 - e. Dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
5. Macet (*loss*)
Kualitas kredit dikatakan macet apabila memenuhi kriteria berikut antara lain:
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 270 hari
 - b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
 - c. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

Teknik Penyelesaian Kredit Macet

Menurut Kasmir (2012:120) Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan beberapa metode, yaitu:

1. *Rescheduling*
2. *Reconditioning*
3. *Restructuring*
4. Kombinasi

5. Penyitaan jaminan

Metode Perhitungan Bunga

1. Perhitungan Suku Bunga Flat

Dalam metode ini, perhitungan bunga selalu menghasilkan nilai bunga yang sama setiap bulan, karena bunga dihitung dari presentase bunga dikalikan pokok pinjaman awal.

Rumus perhitungannya:

Bunga perbulan = $(P \times i \times t) : jb$

Keterangan

P = Pokok pinjaman

i = suku bunga per tahun

t = jumlah tahun jangka waktu kredit

jb = jumlah bulan dalam jangka waktu kredit

Berikut adalah contoh kasus perhitungan suku bunga *flat*:

Bunga *flat* sebesar 5,3739 % pertahun

2. Perhitungan Suku Bunga Efektif

Metode ini menghitung bunga yang harus dibayar setiap bulan sesuai dengan saldo pokok pinjaman bulan sebelumnya.

Rumus Perhitungannya:

Bunga = $SP \times i \times (30/360)$

Keterangan:

SP = saldo pokok pinjaman bulan sebelumnya

i = suku bunga per tahun

30 = jumlah hari dalam 1 bulan

360 = jumlah hari dalam 1 tahun

Berikut adalah contoh kasus perhitungan suku bunga efektif:

Bunga efektif 10% pertahun

3. Perhitungan Suku Bunga Anuitas

Merupakan modifikasi dari metode efektif. Metode ini mengatur jumlah angsuran pokok dan bunga yang dibayar agar sama setiap bulan.

Rumus Perhitungannya:

Bunga = $SP \times i \times (30/360)$

Keterangan:

SP = saldo pokok pinjaman bulan sebelumnya

i = suku bunga per tahun

30 = jumlah hari dalam 1 bulan

360 = jumlah hari dalam 1 tahun

GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN

PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (selanjutnya disebut “BNI” atau “Bank”) pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai Bank sentral dengan nama “Bank Negara Indonesia” berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi “Bank Negara Indonesia 1946”, dan statusnya menjadi Bank Umum Milik Negara. Selanjutnya, peran BNI sebagai Bank yang diberi mandat untuk memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional dikukuhkan oleh UU No. 17 tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1992, tanggal 29 April 1992, telah dilakukan penyesuaian bentuk hukum BNI menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas (Persero). Penyesuaian bentuk hukum menjadi Persero, dinyatakan dalam Akta No. 131, tanggal 31 Juli 1992, dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992 Tambahan No. 1A.

BNI merupakan Bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) pertama yang menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996. Untuk memperkuat struktur keuangan dan daya saingnya di tengah industri perbankan nasional, BNI melakukan sejumlah aksi korporasi, antara lain proses rekapitalisasi oleh Pemerintah di tahun 1999, divestasi saham Pemerintah di tahun 2007, dan penawaran umum saham terbatas di tahun 2010. Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar BNI telah dilakukan penyesuaian. Penyesuaian tersebut dinyatakan dalam Akta No. 46 tanggal 13 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, berdasarkan keputusan

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 28 Mei 2008 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.02-50609 tanggal 12 Agustus 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103 tanggal 23 Desember 2008 Tambahan No. 29015.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar BNI dilakukan antara lain tentang penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar sesuai dengan Akta No. 35 tanggal 17 Maret 2015 Notaris Fathiah Helmi, S.H. telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0776526 tanggal 14 April 2015.

Saat ini, 60% saham-saham BNI dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, sedangkan 40% sisanya dimiliki oleh masyarakat, baik individu maupun institusi, domestik dan asing. BNI kini tercatat sebagai Bank nasional terbesar ke-4 di Indonesia, dilihat dari total aset, total kredit maupun total dana pihak ketiga. Dalam memberikan layanan finansial secara terpadu, BNI didukung oleh sejumlah perusahaan anak, yakni Bank BNI Syariah, BNI Multifinance, BNI Sekuritas, BNI Life Insurance, dan BNI Remittance.

BNI menawarkan layanan penyimpanan dana maupun fasilitas pinjaman baik pada segmen korporasi, menengah, maupun kecil. Beberapa produk dan layanan terbaik telah disesuaikan dengan kebutuhan nasabah sejak kecil, remaja, dewasa, hingga pensiun.

Visi dan Misi

Visi dan misi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk adalah diuraikan sebagai berikut:

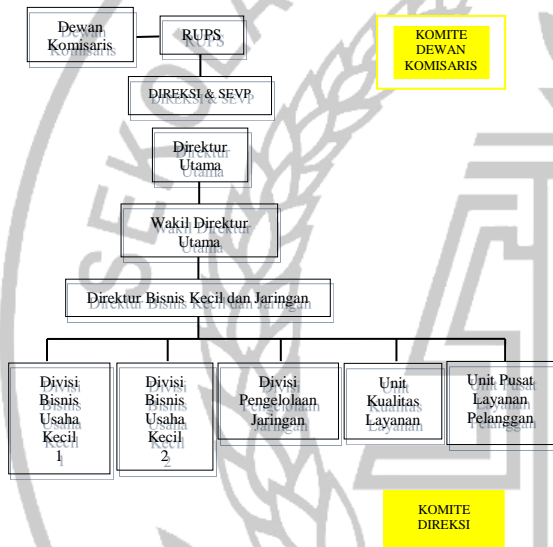
Visi BNI

Menjadi Lembaga Keuangan yang Unggul dalam Layanan dan Kinerja.

Misi BNI

1. Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada seluruh nasabah, dan selaku mitra pilihan utama.
2. Meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor.
3. Menciptakan kondisi terbaik bagi karyawan sebagai kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi.
4. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan komunitas.
5. Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik bagi industri.

Struktur Organisasi



Sumber: website BNI, diolah

Profil Usaha

Berikut ini merupakan produk pinjaman BNI:

1. BNI Griya
2. BNI Griya Multiguna
3. BNI Fleksi
4. BNI *Instant*
5. BNI Fleksi Pensiun
6. Kredit Modal Kerja
7. Kredit Investasi
8. Kredit *Supply Chain*
9. Kredit Kepada Lembaga Keuangan (KKLK)
10. BNI Wirausaha (BWU)
11. Kredit Usaha Rakyat
12. *Two Step Loan*
13. *Two Step Loan* – IEPC 2

14. Kredit Beragun Deposito Berjangka

PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang pembahasan hasil penelitian menjeleskan tentang tujuan dari rumusan masalah adapun penjelasannya sebagai berikut:

Persyaratan dan Ketentuan Pengajuan KUR di BNI Jakarta

Persyaratan Umum:

- a. Warga Negara Indonesia (WNI) dan wajib memiliki NIK dengan melampirkan KTP elektronik atau surat keterangan pembuatan KTP elektronik.
- b. Usaha telah berjalan minimal 6 (enam) bulan.
- c. Tidak sedang menerima kredit produktif dari perbankan.
- d. Diperbolehkan memiliki Kredit Pemilikan Rumah, kendaraan, atau kartu kredit dalam kondisi lancar.

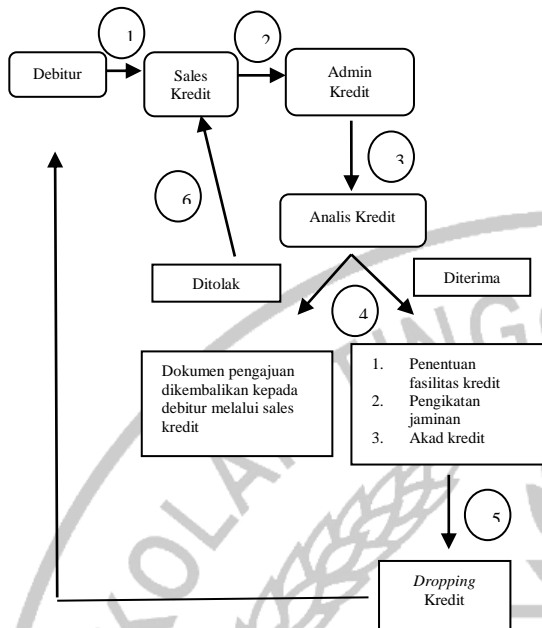
Dokumen Pengajuan BNI KUR

Fitur	KUR Mikro	KUR Kecil
Fotocopy e-KTP dan KK	✓	✓
Fotocopy Surat Nikah (bagi yang telah menikah)	✓	✓
Surat izin usaha (SIUP, TDP, SITU, HO) atau keterangan usaha dari kelurahan atau kecamatan	✓	✓
Fotocopy dokumen agunan	-	✓
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk kredit diatas Rp. 50.000.000	-	✓

Sumber: Internal BNI, diolah

Prosedur Pemberian KUR pada BNI Jakarta

Prosedur Pemberian KUR



Sumber: Internal BNI, diolah

Berikut keterangan gambar 4.1 Prosedur Pemberian KUR, adalah:

1. Calon debitur yaitu UMKM mengajukan permohonan kredit tertulis untuk memperoleh KUR pada BNI dengan melengkapi dokumen persyaratan yang telah ditentukan oleh BNI. Debitur KUR wajib dijamin ke perusahaan penjamin yaitu PT. Askrindo atau Perum Jamkrindo. Kemudian Petugas BNI yaitu bagian Sales Kredit meneliti kelengkapan dokumen debitur yang telah diajukan kepada pihak BNI untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan tersebut sudah lengkap dan benar. Atas dasar permohonan tersebut, bagian sales kredit melakukan *survey* atau mencari informasi mengenai calon debitur di tempat tinggal maupun tempat usahanya dengan tujuan untuk memastikan objek yang akan dibiayai benar-benar ada dan sesuai dengan permohonan kredit yang diajukan.

2. Selanjutnya Admin Kredit memeriksa kelengkapan dokumen yang nantinya untuk dianalisis kelayakan kredit.
3. Setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan data, lalu dilakukan analisis oleh bagian Analisis Kredit agar diperoleh kepastian bahwa kredit tersebut benar-benar tepat guna dan sasaran, serta aman bagi pihak BNI.
4. Apabila kredit disetujui oleh bagian analisis kredit, selanjutnya dilakukan penentuan fasilitas atau jumlah pinjaman yang diberikan kepada debitur. Selanjutnya dilakukan pengikatan jaminan serta akad kredit antara pihak peminjam dan pihak bank.
5. KUR yang telah disetujui dan telah dilakukan penandatanganan perjanjian kredit beserta jaminannya, lalu dilakukan pencairan kredit dan dananya dikreditkan langsung ke rekening debitur yang ada di BNI (rekening giro atau rekening tabungan BNI). Atas penyaluran KUR tersebut debitur mendapatkan subsidi bunga yang ditagihkan oleh BNI melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang dikelola oleh kementerian keuangan.

6. Apabila pengajuan permohonan KUR ditolak, dokumen pengajuan KUR dikembalikan kepada debitur melalui bagian sales kredit.

Penentuan Plafon KUR pada BNI Jakarta

Plafon penyaluran KUR BNI ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Plafon penyaluran KUR BNI tahun 2018 sebesar Rp. 13.440.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

- a. KUR Mikro = Rp. 3.360.000.000
- b. KUR Kecil = Rp. 9.856.000.000
- c. KUR TKI = Rp. 224.000.000

Sedangkan untuk plafon yang diberikan oleh debitur KUR yaitu sebesar:

- a. Plafon KUR Mikro (s/d Rp. 25.000.000) dengan jangka waktu maksimal 3 tahun untuk Kredit Modal

Kerja dan maksimal 5 tahun untuk Kredit Investasi

- b. Plafon KUR Kecil ($>$ Rp. 25.000.000 s/d Rp. 500.000.000) dengan jangka waktu maksimal 4 tahun untuk Kredit Modal Kerja dan 5 tahun untuk Kredit Investasi.

Sementara untuk plafon KUR yang disalurkan BNI kepada setiap UMKM mengacu kepada kebutuhan modal kerja atau biaya investasi yang diperlukan serta kapasitas usahanya.

Perhitungan Angsuran KUR pada BNI Jakarta

Perhitungan suku bunga KUR BNI mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 11 Tahun 2017 sebagai berikut:

Suku bunga KUR tahun 2018 sebesar 7% efektif per tahun. Secara umum, untuk mempermudah debitur KUR dalam memenuhi kewajibannya kepada BNI, total angsuran pokok dan bunga setiap bulannya sama. Beberapa kegiatan khusus, misalnya pertanian yang bersifat musiman, jadwal pembayarannya menyesuaikan siklus usahanya atau “yarnen” (bayar panen).

Debitur KUR BNI bebas provisi dan komisi hanya dikenakan biaya administrasi yang ringan dan terjangkau sebagai berikut:

- a. KUR Mikro, untuk KUR Mikro maksimal Rp. 150.000
b. KUR Kecil, untuk KUR Kecil maksimal Rp. 500.000

Berikut ini adalah contoh kasus permohonan pengajuan Kredit Usaha rakyat (KUR) Mikro pada BNI Jakarta:

Pada tanggal 9 April 2018, Bu Merry datang ke outlet BNI Jakarta untuk mengajukan pinjaman KUR. Yang nantinya nanti akan dijadikan modal kerja untuk usaha barunya. Bu Merry mengajukan KUR pada BNI dengan nilai Rp. 24.000.000 dengan jangka waktu 2 tahun dan suku bunga yang ditetapkan oleh BNI sebesar 7% efektif per tahun, biaya administrasi Rp. 150.000. Berapakah

angsuran pokok serta bunga yang akan di bayar oleh Bu Merry tiap bulannya?

Diketahui:

- a. Pokok pinjaman = Rp. 24.000.000
b. Bunga per tahun = 7%
c. Tenor pinjaman = 2 tahun / 24 bulan
Metode perhitungan ini menghitung bunga yang harus dibayar setiap bulan sesuai dengan saldo pokok pinjaman bulan sebelumnya.

Rumus perhitungan bunga:

$$\text{Bunga} = \text{SP} \times i \times (30/360)$$

Berikut ini adalah perhitungan bunga efektif tiap bulan:

Bunga efektif bulan pertama

$$\frac{\text{Rp. 24.000.000} \times 7\% \times 30 \text{ hari}}{360}$$

$$= \text{Rp. 140.000}$$

Angsuran pokok dan bunga pada bulan pertama adalah

$$\text{Rp. 1.000.000} + \text{Rp. 140.000} = \text{Rp. 1.140.000}$$

Bunga efektif bulan kedua

$$\frac{\text{Rp. 23.000.000} \times 7\% \times 30 \text{ hari}}{360}$$

$$= \text{Rp. 134.167}$$

Angsuran pokok dan bunga pada bulan kedua adalah

$$\text{Rp. 1.000.000} + \text{Rp. 134.167} = \text{Rp. 1.134.167}$$

Bunga efektif bulan ketiga

$$\frac{\text{Rp. 22.000.000} \times 7\% \times 30 \text{ hari}}{360}$$

$$= \text{Rp. 128.333}$$

Angsuran pokok dan bunga pada bulan kedua adalah

$$\text{Rp. 1.000.000} + \text{Rp. 134.167} = \text{Rp. 1.128.333}$$

Angsuran bulan kedua dan bulan ketiga lebih kecil dari angsuran bulan pertama. Demikian pula sampai dengan bulan ke dua puluh empat, besar angsuran akan semakin menurun dikarenakan perhitungan bunganya sesuai dengan saldo pokok pinjaman bulan sebelumnya.

Berikut ini adalah tabel angsuran pinjaman KUR di BNI yang akan di bayar setiap bulan oleh Ibu Merry:

Angsuran KUR BNI

Bulan	Angsuran Pokok	Angsuran Bunga	Total Angsuran	Saldo Pinjaman
0				24.000.000
1	1.000.000	140.000	1.140.000	23.000.000
2	1.000.000	134.167	1.134.167	22.000.000
3	1.000.000	128.333	1.128.333	21.000.000
4	1.000.000	122.500	1.122.500	20.000.000
5	1.000.000	116.667	1.116.667	19.000.000
6	1.000.000	110.833	1.110.833	18.000.000
7	1.000.000	105.000	1.105.000	17.000.000
8	1.000.000	99.167	1.099.167	16.000.000
9	1.000.000	93.333	1.093.333	15.000.000
10	1.000.000	87.500	1.087.500	14.000.000
11	1.000.000	81.667	1.081.667	13.000.000
12	1.000.000	75.833	1.075.833	12.000.000
13	1.000.000	70.000	1.070.000	11.000.000
14	1.000.000	64.167	1.064.167	10.000.000
15	1.000.000	58.333	1.058.333	9.000.000
16	1.000.000	52.500	1.052.500	8.000.000
17	1.000.000	46.667	1.046.667	7.000.000
18	1.000.000	40.833	1.040.833	6.000.000
19	1.000.000	35.000	1.035.000	5.000.000
20	1.000.000	29.167	1.029.167	4.000.000
21	1.000.000	23.333	1.023.333	3.000.000
22	1.000.000	17.500	1.17.500	2.000.000
23	1.000.000	11.667	1.011.667	1.000.000
24	1.000.000	5.833	1.005.833	-

Sumber: Internal BNI, diolah

Agunan KUR pada BNI Jakarta

Agunan atau jaminan yang diserahkan pada BNI berupa agunan pokok dan agunan tambahan:

a. Agunan pokok

Agunan pokok yang dipersyaratkan adalah kegiatan yang dibiayai oleh BNI. Untuk kredit modal kerja maka jaminannya adalah persediaan yang dibiayai oleh KUR yang diterima sedangkan agunan untuk kredit investasi adalah aktiva tetap (tanah, bangunan, kendaraan, mesin, dll).

b. Agunan tambahan

Selain agunan pokok debitur KUR juga menyerahkan agunan tambahan.

Agunan tambahan untuk debitur KUR Mikro tidak diwajibkan. Sementara untuk KUR Kecil sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing bank penyalur. Ketentuan persyaratan agunan di BNI untuk KUR Kecil adalah nilai agunan tidak melebihi fasilitas KUR yang diterima oleh UMKM/debitur. Jenis agunan tambahan yang dapat diterima oleh BNI adalah tanah, bangunan, kendaraan dan mesin.

Hambatan Pelunasan KUR pada BNI Jakarta

Hambatan yang dialami oleh debitur yaitu pada saat pembayaran angsuran KUR dikarenakan debitur mengalami kesulitan dalam usahanya. Kesulitan atau kemunduran usaha yang disebabkan karena usaha yang dijalankan oleh debitur tidak mencapai target dan sasaran, usaha yang di jalankan oleh debitur memiliki banyak pesaing usaha menjadikan usaha debitur mengalami penurunan pendapatan, dan dikarenakan faktor daya beli masyarakat yang menurun pada usaha debitur. Dimana faktor daya beli masyarakat juga mempengaruhi meningkat atau menurunnya pendapatan suatu usaha debitur.

Sedangkan hambatan yang dialami oleh BNI atas pemberian KUR kepada debitur adalah sebagai berikut:

- Keterbatasan SDM BNI yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu di sektor produksi (pertanian, perikanan, industri pengolahan dan jasa) yang menjadi prioritas penyaluran KUR.
- SDM BNI untuk memproses, membina serta melakukan monitoring atas penyaluran KUR belum dapat mengakomodir seluruh permohonan pengajuan KUR

Solusi Hambatan Pelunasan KUR pada BNI Jakarta

Untuk mengatasi hambatan pada saat proses pelunasan KUR, BNI selalu melakukan *monitoring* atau pemantauan atas fasilitas KUR yang telah disalurkan kepada debitur. Fungsi *monitoring* tersebut untuk memastikan bahwa fasilitas KUR

yang diterima telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Apabila ditemukan permasalahan agar segera dapat diselesaikan atau ditemukan solusi perbaikannya. Apabila kredit yang diberikan tersebut mengalami tunggakan dalam pelunasan KUR maka pihak bank melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan beberapa metode, yaitu:

a. *Rescheduling*

Dalam metode ini penyelamatan kredit dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit untuk meringankan debitur, misalnya memperpanjang jangka waktu kredit dari 1 tahun menjadi 2 tahun sehingga debitur memiliki waktu lama untuk mengembalikan kredit yang telah diberikan oleh pihak bank. *Rescheduling* dilakukan untuk penyelesaian kredit bermasalah pada golongan kredit dalam perhatian khusus yakni termasuk kredit dengan kolektabilitas 2 dengan usia tunggakan sampai dengan 90 hari. Debitur meminjam KUR dengan jangka waktu 12 bulan, pada bulan ke 8 dan 9 saat pelunasan KUR debitur tidak bisa melunasi kreditnya dengan begitu pihak BNI melakukan dispensasi dengan memperpanjang jangka waktu pelunasan kredit yang semula 12 bulan menjadi 14 bulan. Untuk angsuran yang dibayarkan terhadap BNI adalah sisa angsuran pokok dan angsuran bunga yang belum dilunasi.

b. *Reconditioning*

Penyelamatan kredit dilakukan dengan cara penundaan pembayaran angsuran suku bunga tetapi angsuran pokok pinjaman tetap dibayarkan oleh debitur. Dalam hal ini *reconditioning* dilakukan untuk penyelamatan kredit dengan kolektabilitas 3 yaitu kredit kurang lancar dengan usia tunggakan 90 hari sampai dengan 121 hari. Debitur meminjam KUR dengan jangka waktu 24 bulan, pada bulan ke 16, 17, 18 saat

pelunasan KUR debitur mengalami tunggakan atas fasilitas KUR yang diberikan. Pihak BNI melakukan tindakan dengan cara *reconditioning* yang mana debitur dapat melunasi angsuran pokok tetapi angsuran bunganya di bayar dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh pihak debitur dan BNI.

c. *Restructuring*

Penyelamatan kredit dilakukan dengan cara penambahan jumlah kredit. Dalam hal ini *restructuring* dilakukan untuk penyelamatan kredit dengan kolektabilitas 4 yaitu kredit dalam perhatian khusus dengan usia tunggakan 121 sampai dengan 180 hari. Debitur meminjam KUR dengan jangka waktu 24 bulan, pada bulan ke 7, 8, 9, 10, 11 debitur tidak mampu untuk melunasi angsuran pada bulan tersebut dan usaha yang dijalankan oleh debitur mengalami kerugian untuk itu BNI melakukan tindakan *restructuring* dengan memberikan kembali fasilitas kredit untuk digunakan modal atau pengembangan usaha sehingga usaha yang dijalankan oleh debitur membaik. Yang nantinya debitur dapat membayar angsuran pokok dan angsuran bunga, dengan begitu jangka waktu pelunasan KUR menjadi diperpanjang.

d. *Penyitaan Jaminan*

Penyitaan jaminan dilakukan untuk penyelamatan kredit atas debitur yang mengalami tunggakan selama lebih dari 180 hari dan penyitaan jaminan dilakukan untuk kolektabilitas 5 yaitu kredit macet. Jika debitur benar-benar tidak dapat mengembalikan kredit yang dibiayai dan bank telah memberikan SP3 kepada debitur maka dilakukan penyitaan jaminan dan eksekusi (lelang) terhadap jaminan yang diberikan oleh pihak debitur agar pihak bank tidak mengalami kerugian.

Metode lelang eksekusi berdasarkan UU Hak Tanggungan dan UU Fidusia ialah melalui parate eksekusi, yaitu Pemegang Hak Tanggungan, dalam hal

ini bank menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil pelelangan umum tersebut. Lelang eksekusi yang dilaksanakan pada aset yaitu dengan ranah lelang eksekusi atas Hak Tanggungan apabila objek jaminan berupa jaminan tanah atau bangunan atau lelang eksekusi atas fidusia apabila jaminan berupa barang bergerak seperti kendaraan. Prosedur atas lelang eksekusi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pra lelang

- a. Pengajuan permohonan tertulis perihal eksekusi kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang merupakan instansi pemerintah yang berada dibawah Direktorat Jendral Kekayaan Negara pada Kementrian Keuangan. Dalam hal ini bank juga dapat meminta menggunakan jasa pra lelang dari Balai Lelang Swasta.
- b. KPKNL/Balai Lelang Swasta akan melakukan dokumen lelang, yaitu termasuk pada Perjanjian Kredit, Sertifikat Hak Tanggungan, Bukti perincian utang jumlah debitur, bukti peringatan wanprestasi kepada debitur, bukti kepemilikan hak, bukti pemberitahuan pelelangan kepada debitur
- c. Setelah dokumen tersebut diatas lengkap, maka KPKNL akan mengeluarkan penetapan jadwal lelang secara tertulis kepada bank
- d. Bank melakukan pengumuman lelang
Apabila barang yang dilelang adalah barang tidak bergerak maka pengumuman dilakukan sebanyak 2 kali, berselang 15 hari. Pengumuman pertama dilakukan melalui pengumuman tempelan yang dapat dibaca oleh umum atau melalui surat kabar harian. Tetapi pengumuman kedua harus dilakukan melalui surat kabar

harian dan dilakukan 14 hari sebelum pelaksanaan lelang. Jika barang yang dilelang adalah bergerak pengumuman dilakukan 1 kali melalui surat kabar harian paling singkat 6 hari kalender sebelum pelaksanaan lelang

- e. Bank melakukan pemberitahuan lelang kepada debitur.

2. Pelaksanaan lelang

Apabila terdapat potensi keberatan/penolakan atau bahkan gugatan dari debitur, maka bank akan mengupayakan alternative pelaksanaan lelang dengan fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri. Dimana Pengadilan Negeri menyampaikan aanmaning (pemanggilan) kepada debitur agar debitur datang menghadap pada hari yang ditentukan dan melaksanakan kewajibannyapada bank, apabila aanmaning tidak dipatuhi oleh debitur, maka Pengadilan Negeri akan melakukan sita eksekusi atas jaminan debitur tersebut.

Sedangkan solusi BNI dalam mengatasi hambatan pemberian KUR kepada debitur yaitu:

- a. SDM di bagian KUR berpartisipasi aktif dalam program pemerintah seperti Kartu Tani, Perhutanan Sosial dan Kewirausahaan Petani
- b. Melakukan penyaluran KUR dengan pola kerjasama *Supply Chain Financing* bekerjasama perusahaan skala korporasi yang memiliki kredibilitas
- c. Penerapan strategi digitalisasi proses kredit yakni dengan implementasi BNI Kredit Digital
- d. Penambahan SDM pemroses KUR serta penambahan jaringan outlet BNI yang dapat memproses KUR.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil pengamatan berdasarkan penelitian dan dokumen terkait dapat disimpulkan bahwa Kredit Usaha Rakyat

(KUR) adalah fasilitas kredit dari Bank Negara Indonesia (BNI) untuk digunakan sebagai tambahan modal usaha produktif dalam bentuk Kredit Modal Kerja, nasabah juga dapat menggunakan fasilitas kredit ini sebagai Kredit Investasi.

Persyaratan BNI KUR mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 11 Tahun 2017 yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Persyaratan umum untuk debitur BNI KUR yaitu Warga Negara Indonesia (WNI), usaha telah berjalan minimal selama 6 bulan, sedang tidak menerima kredit produktif dari perbankan, diperbolehkan memiliki kredit pemilikan rumah kendaraan, atau kartu kredit selama kredit tersebut dalam kondisi lancar. Fasilitas kredit BNI KUR Mikro diberikan hingga maksimal Rp. 25 juta dengan jangka waktu pengembalian hingga 3 tahun (kredit modal kerja) dan hingga 5 tahun (kredit investasi) sedangkan untuk fasilitas kredit BNI KUR Kecil diberikan hingga maksimal Rp. 25 juta sampai dengan Rp. 500 juta dengan jangka waktu pengembalian hingga 4 tahun (kredit modal kerja) dan hingga 5 tahun (kredit investasi).

Prosedur pemberian kredit BNI KUR pada BNI Jakarta memiliki beberapa tahap yaitu:

- a. Permohonan pengajuan KUR
- b. Analisa kelayakan KUR
- c. Realisasi KUR.

Angsuran KUR dipengaruhi oleh plafon kredit, perhitungan kebutuhan kredit beserta suku bunga yang telah ditetapkan oleh BNI yaitu sebesar 7% efektif per tahun.

Dalam pelaksanaan kredit terdapat hambatan bagi pihak debitur dalam pelunasan KUR yakni terjadi tunggakan atau kesulitan dalam pelunasan kredit yang dipengaruhi oleh beberapa faktor kemunduran usaha yang mengakibatkan pendapatan usaha mengalami penurunan

yaitu seperti tidak tercapainya target dan sasaran, memiliki banyak pesaing, daya beli masyarakat yang menurun. Untuk mengatasi hal tersebut BNI selalu melakukan *monitoring* atas fasilitas KUR yang diberikan kepada debitur apakah KUR yang diterima sudah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan hambatan bagi pihak BNI dalam pemberian KUR kepada debitur yaitu Keterbatasan SDM BNI yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu di sektor produksi (pertanian, perikanan, industri pengolahan dan jasa) yang menjadi prioritas penyaluran KUR. SDM BNI untuk memproses, membina serta melakukan monitoring atas penyaluran KUR belum dapat mengakomodir seluruh permohonan pengajuan KUR serta keterbatasan outlet yang dimiliki oleh BNI dalam menjangkau calon debitur KUR. Solusi yang dilakukan oleh BNI yakni dengan penambahan SDM, Melakukan penyaluran KUR dengan pola kerjasama *Supply Chain Financing* bekerjasama perusahaan skala korporasi yang memiliki kredibilitas, dan penerapan strategi digitalisasi proses kredit yakni dengan implementasi BNI Kredit Digital, Penambahan SDM pemroses KUR serta penambahan jaringan outlet BNI yang dapat memproses KUR.

Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BNI Jakarta sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan tetapi perlu dilakukan peningkatan pada SDM KUR pada BNI Jakarta dalam pelaksanaan KUR untuk meningkatkan pelayanan dalam pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan kesimpulan diatas, antara lain:

1. Sebaiknya Sales Kredit melakukan pendekatan secara emosional kepada debitur KUR dengan itu dapat mengetahui karakteristik dari debitur KUR tersebut, dan lebih mementingkan kualitas pemberian KUR daripada kuantitas.

2. Dilakukan *training* untuk bagian SDM BNI yang memiliki keterbatasan keahlian dalam bidang tertentu di sektor produksi (pertanian, perikanan, industri pengolahan dan jasa) yang menjadi prioritas penyaluran KUR
3. Dilakukan sertifikasi *lending sales representative* bagi SDM untuk menjadi tenaga kerja yang professional dalam menangani pelaksanaan KUR.

Implikasi Penelitian

Adapun implikasi penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pada saat debitur mengajukan permohonan KUR, pihak BNI melakukan analisa mengenai riwayat debitur meminjam kredit di bank lain dengan menggunakan BI *Checking*
2. Diadakan pendekatan kunjungan ke tempat usaha debitur atau menghubungi melalui telepon dan agar tidak ada lagi kredit bermasalah
3. Dalam merekrut SDM dapat dilakukan menggunakan jasa Penyalur Tenaga Kerja Professional.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah Syukur. 1987. Kumpulan Makalah "*Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*". Persadi, Ujung Pandang
- Adhi, "BSL 2", Bank Negara Indonesia, Jakarta Pusat, 18 Juli 2018, waktu 19.00 Wib
- Faisal Abdullah. 2005. *Manajemen Perbankan*. Cetakan Ketiga. Malang: UUM Press
- (https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Negara_Indonesia) diakses 15 April 2018
- (<https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-bunga-kur-2017-tetap-9>) diakses 18 Agustus 2018
- (<http://kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan>) diakses 11 April 2018

(<http://kur.ekon.go.id/perkembangan-kur>) diakses 18 Agustus 2018

(<https://www.bi.go.id>) diakses 15 April 2018

(<http://www.bni.co.id/id-id/>) diakses 15 April 2018

(<https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/17/11/20/ozq4lm383-pemerintah-turunkan-suku-bunga-kur-pada-2018>) diakses 18 Agustus 2018

Inpres Nomor 6 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM

Inpres Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009

Kasmir. 2012. *Dasar-dasar Perbankan*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

_____, 2012. *Manajemen Perbankan*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers

Malayu Hasibuan. 2001. *Dasar-Dasar Perbankan*. Edisi Pertama. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Moh Tjoekam. 1999. *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersil, Konsep, Teknik & Kasus*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1992 tentang BNI menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas (Persero)

Rivai, Veithzal dan Andriana Permata Veithzal. 2006. *Credit Manajemen Handbook*. Edisi Pertama. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946

Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang perbankan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas